

Peran Bank Syariah Indonesia dalam Penguatan Pembiayaan dan Digitalisasi Warung Kelontong Madura di Kabupaten Klaten

Moh. Riyadh Irfan Ramadhani¹, Rais Sani Muharrami²

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Indonesia

riyadhgarel80@email.com¹, raissani.muhammadistaff@uinsaid.ac.id²

Kata Kunci:

Pembiayaan Syariah,
Digitalisasi UMKM, Bank
Syariah Indonesia,
Warung Kelontong
Madura

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis peran Bank Syariah Indonesia (BSI) dalam penguatan pembiayaan dan digitalisasi warung kelontong Madura di Kabupaten Klaten serta mengidentifikasi kendala dalam pemanfaatan layanan tersebut. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan informan yang dipilih melalui purposive sampling. Informan berjumlah 14 orang, terdiri atas 10 pemilik atau pengelola warung, dua petugas BSI KCP Delanggu, dan dua pendamping UMKM. Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi nonpartisipatif, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan analisis tematik. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan metode. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BSI berperan melalui penyediaan pembiayaan syariah untuk modal kerja, fasilitasi transaksi digital menggunakan QRIS dan mobile banking, serta edukasi pengelolaan keuangan. Pembiayaan dipersepsikan membantu meningkatkan ketersediaan dan variasi barang, sedangkan layanan digital memperluas pilihan pembayaran dan mempermudah transaksi usaha. Interaksi dengan BSI juga mendorong sebagian pelaku usaha mulai memisahkan keuangan pribadi dan usaha. Namun, pemanfaatan layanan belum merata karena terkendala oleh pencatatan keuangan yang belum tertib, persepsi terhadap kerumitan administrasi, kekhawatiran terhadap kewajiban angsuran, keterbatasan kemampuan digital, gangguan jaringan, dan dominasi transaksi tunai. Penguatan peran BSI memerlukan pembiayaan yang sesuai dengan arus kas, pendampingan digital berkelanjutan, serta pendekatan personal berbasis komunitas.

Abstract

Keyword:

Sharia Financing, MSME
Digitalization, Bank
Syariah Indonesia,
Madurese Grocery Stores

This study analyzes the role of Bank Syariah Indonesia (BSI) in strengthening financing and digitalization among Madurese grocery stores in Klaten Regency and identifies barriers to using these services. A descriptive qualitative approach was employed, with informants selected through purposive sampling. The study involved 14 informants, comprising ten grocery store owners or managers, two officers from BSI KCP Delanggu, and two MSME facilitators. Data were collected through semi-structured interviews, non-participant observation, and documentation and were analyzed using thematic analysis. Data credibility was maintained through source and method triangulation. The findings indicate that BSI supports Madurese grocery stores by providing sharia-compliant working capital financing, facilitating digital transactions through QRIS and mobile banking, and offering financial management education. Financing was perceived to improve product availability and variety, while digital services expanded payment options and simplified business transactions. Interaction with BSI also encouraged several business owners to separate personal and business finances. However, service utilization remained uneven because of inadequate financial records, perceptions of complicated banking procedures, concerns about installment obligations, limited digital skills, unstable internet connections, and the continued dominance of cash transactions. Strengthening BSI's role therefore requires financing schemes suited to business cash flows, continuous digital assistance, and a personal, community-based engagement approach.

Information Production:

© 2026 by the authors of this article. This work is licensed under an Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)



PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memiliki posisi strategis dalam struktur perekonomian Indonesia karena menjadi ruang penciptaan pendapatan, penyediaan barang dan jasa, serta penguatan aktivitas ekonomi pada tingkat masyarakat. Meskipun demikian, keberlanjutan UMKM masih menghadapi persoalan yang berkaitan dengan keterbatasan akses pembiayaan formal, kemampuan pengelolaan keuangan, literasi digital, dan pemanfaatan teknologi dalam kegiatan usaha. Persoalan tersebut menjadi semakin penting ketika perubahan perilaku konsumen dan perkembangan sistem pembayaran digital menuntut pelaku usaha mikro untuk beradaptasi dengan pola transaksi yang lebih cepat, tercatat, aman, dan terintegrasi.

Tantangan tersebut juga berkaitan dengan belum meratanya tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah di Indonesia. Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan tahun 2024 menunjukkan bahwa indeks literasi keuangan nasional mencapai 65,43 persen dan indeks inklusi keuangan sebesar 75,02 persen. Akan tetapi, indeks literasi keuangan syariah baru mencapai 39,11 persen, sedangkan indeks inklusi keuangan syariah berada pada angka 12,88 persen. Kesenjangan antara tingkat pemahaman dan penggunaan produk keuangan syariah tersebut menunjukkan bahwa keberadaan lembaga keuangan syariah belum sepenuhnya diikuti oleh pemanfaatan layanan secara luas oleh masyarakat dan pelaku usaha mikro (Otoritas Jasa Keuangan dan Badan Pusat Statistik, 2024). Kondisi ini menegaskan perlunya pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada penyediaan produk, tetapi juga pada edukasi, pendampingan, dan penyesuaian layanan dengan karakteristik usaha nasabah.

Dalam konteks tersebut, perbankan syariah memiliki peran yang lebih luas daripada sekadar menjalankan fungsi intermediasi keuangan. Bank syariah dapat menyediakan pembiayaan berbasis prinsip syariah sekaligus mendukung peningkatan kapasitas usaha, pengelolaan keuangan, dan inklusi pelaku UMKM ke dalam sistem keuangan formal. Studi Ritonga dan Sinaga (2021) menunjukkan bahwa perbankan syariah dapat mendukung keberlangsungan UMKM melalui pembiayaan, restrukturisasi, dan pendampingan usaha. Temuan tersebut sejalan dengan Nihayah dan Rifqi (2022), yang menempatkan pembiayaan perbankan syariah sebagai salah satu instrumen penting untuk memperkuat permodalan dan membantu UMKM mempertahankan aktivitas usahanya. Meskipun demikian, efektivitas pembiayaan tidak hanya ditentukan oleh tersedianya dana, tetapi juga oleh kesesuaian prosedur, kemampuan pengembalian, kualitas pencatatan keuangan, dan hubungan kepercayaan antara bank dengan pelaku usaha.

Bank Syariah Indonesia sebagai salah satu lembaga utama dalam industri perbankan syariah nasional memiliki posisi strategis untuk memperluas pembiayaan dan layanan digital kepada UMKM. Selain penyaluran pembiayaan, BSI mengembangkan layanan transaksi dan ekosistem digital yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan keuangan dan operasional. Laporan tahunan perusahaan menunjukkan bahwa pengembangan layanan digital dan penguatan segmen pembiayaan menjadi bagian dari agenda transformasi kelembagaan BSI (PT Bank Syariah Indonesia Tbk, 2025). Namun, ketersediaan produk dan teknologi tidak secara otomatis menghasilkan penerimaan pada tingkat pengguna. Pelaku usaha memerlukan pemahaman mengenai manfaat, biaya, risiko, prosedur penggunaan, dan keterkaitan layanan tersebut dengan kebutuhan usahanya.

Digitalisasi UMKM pada dasarnya tidak terbatas pada kegiatan promosi melalui media sosial. Digitalisasi juga meliputi penggunaan sistem pembayaran nontunai, pencatatan transaksi, pengelolaan arus kas, pemantauan persediaan, pembelian barang, dan komunikasi dengan pemasok maupun pelanggan. Arifqi dan Junaedi (2021) menjelaskan bahwa digitalisasi dapat memperluas ruang adaptasi UMKM dan memperkuat efisiensi kegiatan usaha apabila didukung oleh ekosistem keuangan yang memadai. Dalam industri perbankan syariah, layanan digital juga berpotensi meningkatkan akses masyarakat terhadap produk keuangan dan memperkecil hambatan transaksi, meskipun hasilnya tetap dipengaruhi oleh kemampuan digital pengguna dan kualitas pendampingan lembaga keuangan (Aripin, Fatwa, dan Hannase, 2022).

Salah satu instrumen yang berperan dalam transformasi transaksi UMKM adalah Quick Response Code Indonesian Standard atau QRIS. Bank Indonesia menempatkan digitalisasi sistem pembayaran sebagai bagian dari pembangunan ekosistem ekonomi digital yang terintegrasi dan inklusif (Bank Indonesia, 2024). Pada tingkat pengguna, penerimaan terhadap pembayaran digital berkaitan dengan persepsi mengenai kemanfaatan dan kemudahan penggunaan. Sholihah dan Nurhapsari (2023) menemukan bahwa kedua aspek tersebut menjadi faktor penting dalam membentuk intensi pelaku UMKM untuk menggunakan QRIS. Sementara itu, Alifia, Permana, dan Harnovinsah (2024) menunjukkan bahwa QRIS memberikan peluang bagi UMKM untuk melayani konsumen yang menggunakan berbagai aplikasi pembayaran, memperluas pilihan transaksi, dan mendukung efisiensi pelayanan. Temuan-temuan tersebut memperlihatkan bahwa teknologi pembayaran dapat memperkuat usaha mikro, tetapi pemanfaatannya memerlukan kesiapan pengguna, perangkat, koneksi internet, serta kebiasaan pencatatan yang memadai.

Kebutuhan terhadap pembiayaan dan digitalisasi juga dihadapi oleh warung kelontong Madura. Istilah warung kelontong Madura dalam penelitian ini merujuk pada usaha ritel yang dikelola oleh pedagang asal Madura dan beroperasi di Kabupaten Klaten, bukan warung yang secara geografis berada di Pulau Madura. Warung tersebut umumnya menyediakan kebutuhan sehari-hari dengan jam operasional yang panjang, variasi barang yang relatif lengkap, dan pelayanan yang dekat dengan konsumen. Keberlangsungan usahanya tidak hanya bertumpu pada modal finansial, tetapi juga dipengaruhi oleh etos kerja, jaringan sosial, hubungan kekerabatan, kepercayaan, dan kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan tempat usaha.

Penelitian Wafiruddaroin dan Rezeky (2022) menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi pedagang kelontong Madura berkaitan erat dengan solidaritas sosial dan jaringan komunitas perantau. Izzati, Addainuri, dan Fahrurrozi (2024) juga menemukan bahwa modal sosial dapat menjadi sumber peluang bagi warung Madura, khususnya dalam membangun kepercayaan dan mempertahankan usaha, tetapi pada saat yang sama dapat menimbulkan tantangan apabila ketergantungan terhadap jaringan informal menghambat keterbukaan terhadap institusi formal. Karakteristik tersebut perlu diperhatikan dalam menganalisis hubungan antara pemilik warung dengan lembaga perbankan. Keputusan menggunakan pembiayaan bank tidak semata-mata didasarkan pada perhitungan ekonomi, tetapi dapat pula dipengaruhi oleh kepercayaan, pengalaman administratif, rekomendasi komunitas, dan persepsi terhadap fleksibilitas layanan.

Pada aspek pengelolaan usaha, digitalisasi pencatatan keuangan menjadi kebutuhan penting karena sebagian usaha ritel mikro masih menggabungkan uang rumah tangga dengan uang usaha dan mengandalkan pencatatan sederhana. Sa'diyah dan Eferyn (2024) menunjukkan bahwa penggunaan pencatatan keuangan digital pada toko kelontong Madura dapat membantu pelaku usaha menata transaksi dan memperoleh informasi usaha yang lebih terstruktur. Meskipun demikian, penerapan digitalisasi tidak dapat dipandang sebagai proses yang seragam. Perbedaan usia, pengalaman usaha, pendidikan, kepemilikan perangkat, stabilitas jaringan, dan kemampuan menggunakan aplikasi dapat menghasilkan tingkat penerimaan yang berbeda antarpelaku usaha.

Kajian terdahulu telah membahas peran perbankan syariah dalam pembiayaan UMKM, layanan digital perbankan syariah, penggunaan QRIS, serta modal sosial dan strategi pengelolaan warung Madura. Namun, rumpun penelitian tersebut cenderung berkembang secara terpisah. Kajian pembiayaan syariah umumnya menempatkan UMKM sebagai kategori usaha yang relatif homogen, sedangkan penelitian mengenai warung Madura lebih banyak membahas dinamika sosial, etos kerja, solidaritas, dan strategi mempertahankan usaha. Masih terbatas penelitian yang mengintegrasikan peran pembiayaan syariah, digitalisasi transaksi, literasi keuangan, dan karakteristik sosial warung kelontong Madura pada konteks hubungan antara satu unit perbankan dengan pelaku usaha di wilayah tertentu.

Penelitian ini mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis peran Bank Syariah Indonesia, khususnya BSI KCP Delanggu, dalam penguatan pembiayaan dan digitalisasi warung kelontong Madura di Kabupaten Klaten. Kebaruan penelitian terletak pada analisis terpadu terhadap bentuk dukungan BSI, pengalaman pelaku warung dalam mengakses dan menggunakan layanan, perubahan pengelolaan usaha yang mereka rasakan, serta hambatan administratif, sosial, finansial, dan teknologis yang muncul dalam proses tersebut. Berdasarkan fokus itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran BSI dalam mendukung pembiayaan dan digitalisasi warung kelontong Madura di Kabupaten Klaten serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi bank dan pelaku usaha dalam pemanfaatan layanan tersebut. Secara akademik, penelitian ini diharapkan memperkaya kajian mengenai inklusi keuangan syariah berbasis karakteristik usaha. Secara praktis, hasilnya dapat menjadi dasar bagi BSI dalam merancang pembiayaan, edukasi, dan pendampingan digital yang lebih adaptif terhadap kebutuhan pelaku usaha mikro.

METODE PENELITIAN

Pendekatan dan Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian diarahkan untuk memahami secara mendalam peran Bank Syariah Indonesia dalam mendukung pembiayaan dan digitalisasi warung kelontong Madura di Kabupaten Klaten berdasarkan pengalaman, pandangan, dan praktik para pihak yang terlibat. Penelitian ini tidak dimaksudkan untuk mengukur besarnya pengaruh antarvariabel atau membuktikan hubungan sebab-akibat, tetapi untuk mengidentifikasi bentuk dukungan yang diberikan BSI, proses pemanfaatan layanan oleh pelaku usaha, manfaat yang dirasakan, serta kendala yang muncul dalam pelaksanaannya.

Desain deskriptif digunakan untuk menggambarkan fenomena penelitian secara sistematis berdasarkan kondisi yang ditemukan di lapangan. Melalui desain ini, peneliti dapat menelaah hubungan antara layanan perbankan syariah dengan kebutuhan permodalan, transaksi digital, pencatatan keuangan, pengelolaan persediaan, dan keberlanjutan usaha warung kelontong Madura. Perubahan usaha yang dibahas dalam penelitian ini dipahami sebagai perubahan yang dirasakan dan disampaikan oleh informan berdasarkan pengalaman mereka, bukan sebagai dampak kausal yang telah diuji secara statistik.

Fokus penelitian dibatasi pada hubungan antara BSI KCP Delanggu dengan warung kelontong Madura yang beroperasi di Kabupaten Klaten. Istilah warung kelontong Madura dalam penelitian ini merujuk pada usaha ritel kebutuhan sehari-hari yang dikelola oleh pelaku usaha asal Madura dan menjalankan aktivitas usahanya di wilayah Kabupaten Klaten. Dengan demikian, lokasi penelitian tidak berada di Pulau Madura. Unit analisis penelitian adalah proses dukungan BSI terhadap pelaku warung yang mencakup akses

pembiayaan syariah, pemanfaatan layanan transaksi digital, literasi dan pengelolaan keuangan, pendampingan usaha, serta hambatan dalam penggunaan layanan perbankan.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, dengan fokus kelembagaan pada BSI KCP Delanggu dan warung kelontong Madura yang berada dalam wilayah layanan kantor cabang tersebut. Pemilihan BSI KCP Delanggu didasarkan pada keterlibatan kantor cabang tersebut dalam menyediakan layanan perbankan, pembiayaan usaha mikro, serta layanan transaksi digital yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku UMKM, termasuk pemilik warung kelontong Madura. Pemilihan Kabupaten Klaten sebagai lokasi penelitian juga didasarkan pada keberadaan warung kelontong Madura yang berkembang di sejumlah wilayah dan menjadi bagian dari aktivitas ekonomi masyarakat setempat. Keberadaan usaha tersebut memberikan konteks yang relevan untuk memahami bagaimana pelaku usaha mikro dengan karakteristik sosial dan pola pengelolaan tertentu berinteraksi dengan lembaga keuangan syariah.

Informan Penelitian

Informan penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu penentuan informan secara sengaja berdasarkan pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan mereka dalam pembiayaan, layanan digital perbankan, serta pengelolaan warung kelontong Madura. Teknik tersebut digunakan karena tidak seluruh pelaku usaha maupun petugas bank memiliki pengalaman dan informasi yang sesuai dengan fokus penelitian.

Informan dalam penelitian ini berjumlah 14 orang yang terdiri atas sepuluh pemilik atau pengelola warung kelontong Madura, dua petugas BSI KCP Delanggu, dan dua pendamping UMKM atau pihak yang memahami perkembangan usaha mikro di wilayah penelitian. Dari sepuluh pemilik warung, tujuh orang merupakan pengguna layanan BSI, sedangkan tiga orang belum menggunakan pembiayaan BSI atau masih mengandalkan modal pribadi, keluarga, dan sumber pembiayaan informal. Pelibatan pengguna dan nonpengguna layanan BSI dimaksudkan untuk memperoleh pandangan yang lebih beragam mengenai manfaat, hambatan, alasan penggunaan, serta alasan penolakan terhadap layanan perbankan formal.

Tabel 1. Komposisi Informan Penelitian

Kelompok informan	Jumlah	Keterangan
Pemilik atau pengelola warung pengguna BSI	7 orang	Menggunakan pembiayaan, rekening, QRIS, mobile banking, atau layanan BSI lainnya
Pemilik atau pengelola warung nonpengguna BSI	3 orang	Menggunakan modal mandiri, dukungan keluarga, atau sumber pembiayaan informal
Petugas BSI KCP Delanggu	2 orang	Terlibat dalam pelayanan, pembiayaan UMKM, pemasaran produk, atau layanan digital
Pendamping atau pihak yang memahami UMKM setempat	2 orang	Memahami perkembangan dan permasalahan warung kelontong Madura di Kabupaten Klaten
Total	14 orang	

Pemilik atau pengelola warung dipilih berdasarkan beberapa pertimbangan, yaitu menjalankan usaha secara aktif di Kabupaten Klaten, terlibat langsung dalam pengelolaan modal, transaksi, persediaan, dan pencatatan keuangan, serta memiliki pengetahuan mengenai penggunaan atau alasan tidak menggunakan layanan BSI. Informan juga dipertimbangkan berdasarkan lama usaha sekurang-kurangnya [sesuaikan dengan data penelitian, misalnya satu tahun], sehingga memiliki pengalaman yang cukup untuk menjelaskan perkembangan dan permasalahan usahanya.

Petugas BSI dipilih karena memiliki keterlibatan dalam pelayanan nasabah UMKM, proses pengajuan pembiayaan, sosialisasi produk, atau pengembangan layanan digital. Sementara itu, pendamping UMKM dipilih karena memiliki pengetahuan mengenai kondisi usaha mikro, kemampuan pengelolaan keuangan, tingkat penerimaan teknologi, dan hubungan pelaku usaha dengan lembaga pembiayaan formal. Untuk menjaga kerahasiaan identitas, pemilik warung diberi kode W1 sampai W10, petugas BSI diberi kode B1 dan B2, sedangkan pendamping UMKM diberi kode P1 dan P2.

Jenis dan Sumber Data

Data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara semi-terstruktur dan observasi lapangan. Data primer dari pemilik warung mencakup informasi mengenai sejarah usaha, kebutuhan permodalan, pengalaman mengakses pembiayaan, alasan menggunakan atau tidak menggunakan layanan BSI, pemanfaatan QRIS dan mobile banking,

pengelolaan arus kas, pencatatan transaksi, pengelolaan persediaan, serta kendala administratif dan teknologis yang dihadapi.

Data primer dari petugas BSI digunakan untuk memperoleh informasi mengenai bentuk layanan yang diberikan kepada pelaku UMKM, persyaratan dan prosedur pembiayaan, penilaian kelayakan calon nasabah, penyediaan layanan digital, bentuk edukasi yang dilakukan, serta kendala yang dihadapi dalam memperluas pembiayaan dan digitalisasi usaha mikro. Adapun data dari pendamping UMKM digunakan untuk memahami karakteristik pengelolaan usaha, tingkat literasi keuangan, penerimaan teknologi, hubungan sosial pelaku usaha, serta kondisi yang memengaruhi keputusan pemilik warung dalam menggunakan layanan perbankan.

Data sekunder diperoleh dari laporan tahunan Bank Syariah Indonesia, informasi mengenai produk pembiayaan dan layanan digital, publikasi Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Badan Pusat Statistik, dokumen UMKM Kabupaten Klaten, artikel ilmiah, serta sumber dokumenter lain yang relevan. Data sekunder digunakan untuk memberikan konteks terhadap hasil penelitian dan memperkuat interpretasi atas data lapangan. Data sekunder tidak digunakan sebagai pengganti keterangan informan, melainkan sebagai bahan pembandingan dan pendukung proses analisis.

Teknik Pengumpulan Data

Wawancara Semi-Terstruktur

Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur dengan menggunakan pedoman pertanyaan yang disusun sesuai dengan fokus penelitian. Bentuk wawancara tersebut memungkinkan peneliti mengajukan pertanyaan utama secara konsisten kepada setiap kelompok informan, sekaligus memberikan ruang bagi informan untuk menjelaskan pengalaman, pandangan, dan permasalahan yang dianggap penting. Wawancara dengan pemilik warung membahas sejarah dan perkembangan usaha, sumber modal, pengalaman mengakses pembiayaan, alasan memilih atau tidak memilih BSI, penggunaan QRIS dan mobile banking, bentuk edukasi atau pendampingan yang pernah diterima, perubahan pengelolaan transaksi dan persediaan, serta kendala dalam memanfaatkan layanan bank. Wawancara dengan petugas BSI diarahkan pada proses pembiayaan UMKM, karakteristik calon nasabah, prosedur penilaian usaha, bentuk pelayanan digital, strategi edukasi, serta hambatan operasional. Wawancara dengan pendamping UMKM difokuskan pada karakteristik usaha warung kelontong Madura, pola pengelolaan keuangan, hubungan sosial, kemampuan digital, dan interaksi pelaku usaha dengan lembaga keuangan formal.

Wawancara dilaksanakan secara tatap muka di lokasi yang disepakati bersama informan, baik di tempat usaha maupun di kantor BSI. Durasi wawancara berlangsung sekitar [isi sesuai catatan aktual] menit untuk setiap informan. Dengan persetujuan informan, wawancara direkam menggunakan perangkat perekam suara dan dilengkapi dengan catatan lapangan. Rekaman wawancara selanjutnya ditranskripsikan agar pernyataan informan dapat dianalisis secara utuh. Apabila terdapat wawancara yang tidak direkam, informasi dicatat secara rinci selama dan segera setelah wawancara berlangsung.

Observasi

Observasi dilakukan secara langsung pada kegiatan operasional warung kelontong Madura. Observasi digunakan untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi nyata usaha dan memeriksa kesesuaian antara pernyataan informan dengan praktik yang terlihat di lapangan. Aspek yang diamati meliputi pelaksanaan transaksi tunai dan nontunai, ketersediaan QRIS, penggunaan telepon seluler atau aplikasi perbankan, cara pencatatan transaksi, pengelolaan persediaan, pemisahan uang pribadi dan usaha, penataan barang, serta interaksi pemilik warung dengan konsumen. Observasi dilakukan secara nonpartisipatif. Dalam hal ini, peneliti tidak terlibat dalam kegiatan perdagangan atau pengambilan keputusan usaha, tetapi mengamati dan mencatat aktivitas yang relevan dengan tujuan penelitian. Hasil observasi dituangkan dalam catatan lapangan dan digunakan sebagai bahan pembandingan terhadap data wawancara.

Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk melengkapi dan memperkuat data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi. Dokumen yang dikumpulkan dapat berupa foto fasilitas QRIS, materi sosialisasi layanan BSI, informasi mengenai produk pembiayaan, catatan transaksi atau pembukuan yang bersedia diperlihatkan oleh informan, laporan kelembagaan, serta dokumen lain yang relevan dengan pembiayaan dan digitalisasi usaha. Dokumen yang mengandung informasi pribadi dan rahasia, seperti nomor rekening, saldo, identitas nasabah, rincian angsuran, dan nilai pembiayaan individual, tidak disalin atau dipublikasikan tanpa persetujuan pemilik data. Dokumentasi digunakan secara selektif dengan tetap memperhatikan kerahasiaan dan kepentingan informan.

Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, peneliti berperan sebagai instrumen utama yang menentukan fokus penelitian, memilih informan, melakukan wawancara, melaksanakan observasi, menafsirkan data, dan menyusun kesimpulan. Kedudukan peneliti sebagai instrumen utama memungkinkan proses pengumpulan dan analisis data dilakukan secara fleksibel sesuai dengan perkembangan temuan di lapangan. Untuk menjaga keteraturan proses penelitian, digunakan beberapa instrumen pendukung, yaitu pedoman wawancara semi-terstruktur, lembar observasi, catatan lapangan, perangkat perekam suara, matriks dokumentasi, serta lembar pengkodean data. Pedoman wawancara dibedakan berdasarkan kelompok informan karena pemilik warung, petugas BSI, dan pendamping UMKM memiliki pengalaman serta kewenangan yang berbeda. Instrumen pendukung tersebut membantu memastikan bahwa data yang dikumpulkan tetap sesuai dengan tujuan penelitian tanpa membatasi munculnya informasi baru dari informan.

Teknik Analisis Data

Data dianalisis menggunakan analisis tematik. Analisis dilakukan secara bertahap sejak proses pengumpulan data hingga penyusunan laporan penelitian. Tahap awal dilakukan melalui familiarisasi data dengan membaca transkrip wawancara, catatan observasi, dan dokumentasi secara berulang. Proses ini bertujuan memperoleh pemahaman menyeluruh terhadap pengalaman informan dan konteks penelitian. Setelah proses familiarisasi, peneliti memberikan kode awal pada bagian-bagian data yang berkaitan dengan akses pembiayaan, prosedur perbankan, penggunaan layanan digital, pencatatan transaksi, pengelolaan persediaan, manfaat yang dirasakan, kepercayaan kepada bank, serta hambatan administratif dan teknologi. Kode-kode yang memiliki kesamaan makna kemudian dikelompokkan menjadi kategori dan tema sementara.

Tema sementara selanjutnya ditinjau kembali dengan membandingkannya terhadap keseluruhan transkrip, catatan observasi, dan dokumen pendukung. Peninjauan dilakukan untuk memastikan bahwa setiap tema benar-benar didukung oleh data dan memiliki batas yang jelas dengan tema lainnya. Setelah itu, tema didefinisikan dan diberi nama sesuai dengan makna utama yang terkandung di dalamnya. Proses pengkodean dilakukan dengan mengombinasikan pendekatan induktif dan deduktif. Pendekatan induktif digunakan untuk menemukan pola yang muncul langsung dari pengalaman informan, sedangkan pendekatan deduktif digunakan untuk mengorganisasikan data berdasarkan fokus penelitian. Tema yang dianalisis mencakup akses pembiayaan syariah, digitalisasi transaksi, literasi dan pengelolaan keuangan, perubahan kapasitas usaha yang dirasakan, hambatan administratif, kepercayaan terhadap lembaga formal, keterbatasan teknologi, serta kesesuaian produk pembiayaan dengan kebutuhan pelaku usaha.

Interpretasi disusun dengan menghubungkan data empiris, tujuan penelitian, kerangka konseptual, dan penelitian terdahulu. Analisis juga memperhatikan perbedaan antara pengalaman pengguna dan nonpengguna layanan BSI. Data yang berbeda atau bertentangan dengan kecenderungan umum tidak dihilangkan, tetapi digunakan sebagai kasus pembandingan untuk memperkaya interpretasi dan menghindari kesimpulan yang terlalu seragam.

Keabsahan Data

Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diberikan oleh pemilik warung, petugas BSI, dan pendamping UMKM. Informasi mengenai kemudahan proses pembiayaan, misalnya, tidak hanya didasarkan pada keterangan pemilik warung, tetapi dibandingkan dengan penjelasan petugas bank mengenai persyaratan, proses penilaian, dan ketentuan pembiayaan. Triangulasi metode dilakukan dengan membandingkan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pernyataan mengenai penggunaan QRIS, pencatatan transaksi, pemisahan keuangan pribadi dan usaha, atau pengelolaan persediaan diperiksa melalui kondisi yang diamati di lokasi usaha serta dokumen yang dapat ditunjukkan oleh informan.

Konsistensi proses analisis juga dijaga melalui penyimpanan rekaman, transkrip, catatan lapangan, hasil pengkodean, dan pengembangan tema. Penggunaan kutipan langsung informan dalam penyajian hasil dilakukan untuk menunjukkan keterkaitan antara interpretasi peneliti dan data lapangan. Apabila konfirmasi hasil wawancara kepada informan atau member checking memang dilakukan, ringkasan informasi atau interpretasi tertentu disampaikan kembali kepada informan untuk memastikan bahwa peneliti tidak keliru memahami maksud pernyataan mereka.

Etika Penelitian

Pelaksanaan penelitian memperhatikan prinsip kesukarelaan, kerahasiaan, dan perlindungan terhadap informan. Sebelum wawancara dilakukan, setiap informan memperoleh penjelasan mengenai tujuan penelitian, bentuk keterlibatan, jenis informasi yang dibutuhkan, penggunaan data, serta hak untuk tidak menjawab

pertanyaan tertentu atau menghentikan wawancara. Wawancara dilaksanakan setelah informan menyatakan persetujuan untuk berpartisipasi. Identitas informan disamarkan melalui penggunaan kode. Nama pribadi, alamat lengkap warung, nomor rekening, nilai saldo, dan informasi pembiayaan yang bersifat rahasia tidak dicantumkan dalam laporan penelitian. Kutipan wawancara disajikan dengan menghilangkan informasi yang dapat mengungkap identitas informan. Rekaman, transkrip, catatan lapangan, dan dokumen penelitian disimpan secara terbatas serta hanya digunakan untuk kepentingan akademik.

Penggunaan nama BSI KCP Delanggu dalam artikel ditujukan untuk menjelaskan lokus kelembagaan penelitian dan tidak digunakan untuk membuka informasi rahasia nasabah maupun menilai kinerja individu petugas. Peneliti juga menjaga agar hubungan antara petugas bank dan nasabah tidak memengaruhi kebebasan informan dalam memberikan jawaban. Informasi yang disampaikan oleh pemilik warung tidak diberikan kepada pihak bank dalam bentuk yang dapat mengungkap identitas maupun posisi pribadi informan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Informan dan Karakteristik Usaha

Penelitian melibatkan 14 informan yang terdiri atas sepuluh pemilik atau pengelola warung kelontong Madura, dua petugas BSI KCP Delanggu, dan dua pendamping UMKM di Kabupaten Klaten. Dari sepuluh pelaku warung, tujuh informan telah menggunakan satu atau lebih layanan BSI, sedangkan tiga informan belum menggunakan pembiayaan BSI dan masih mengandalkan modal pribadi, dukungan keluarga, atau sumber pembiayaan informal. Warung yang dikelola para informan menyediakan kebutuhan sehari-hari, seperti beras, minyak goreng, gula, makanan ringan, minuman, produk kebersihan, pulsa, dan token listrik. Sebagian besar usaha dikelola secara langsung oleh pemilik dengan bantuan anggota keluarga. Pemilik warung tidak hanya melayani konsumen, tetapi juga melakukan pembelian barang, mengendalikan persediaan, mengatur arus kas, dan menentukan sumber permodalan. Salah seorang pemilik warung menjelaskan bahwa pengelolaan usaha masih bertumpu pada keterlibatan keluarga: “Warung ini saya kelola bersama istri. Kalau saya pergi mengambil barang, istri yang menjaga. Semua pembelian, uang masuk, dan pembayaran ke pemasok masih kami atur sendiri.”

Keterlibatan keluarga membuat proses pengambilan keputusan berlangsung relatif cepat. Namun, kondisi tersebut juga menyebabkan pengelolaan keuangan sangat bergantung pada pengetahuan dan kebiasaan pemilik. Ketika pemilik belum memiliki pencatatan yang teratur, informasi mengenai keuntungan, modal yang masih tersedia, dan pengeluaran rumah tangga sering tidak dapat dibedakan secara jelas. Perbedaan juga terlihat dalam pemanfaatan teknologi. Sebagian informan telah menggunakan QRIS dan aplikasi mobile banking, sedangkan sebagian lainnya masih mengutamakan transaksi tunai. Seorang informan menyampaikan: “QRIS sudah saya pasang, tetapi tidak semua pembeli menggunakannya. Anak muda biasanya membayar pakai QRIS, sementara pembeli yang sudah tua tetap memakai uang tunai.”

Temuan tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi warung kelontong Madura di Kabupaten Klaten berlangsung secara bertahap. Ketersediaan fasilitas digital belum selalu diikuti penggunaan secara intensif karena dipengaruhi oleh kebiasaan pelanggan, kemampuan pemilik warung, kondisi perangkat, dan stabilitas jaringan internet.

Tabel 2. Komposisi Informan Penelitian

Kelompok informan	Jumlah	Karakteristik keterlibatan
Pemilik warung pengguna BSI	7 orang	Menggunakan rekening, pembiayaan, QRIS, mobile banking, atau layanan transaksi BSI
Pemilik warung nonpengguna BSI	3 orang	Menggunakan modal pribadi, dukungan keluarga, atau pembiayaan informal
Petugas BSI KCP Delanggu	2 orang	Memahami pelayanan, pembiayaan UMKM, dan layanan digital
Pendamping UMKM	2 orang	Memahami kondisi usaha mikro, pengelolaan keuangan, dan hambatan digitalisasi
Total	14 orang	

Peran BSI dalam Memperluas Akses Pembiayaan Syariah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran utama BSI yang dirasakan oleh pelaku warung berkaitan dengan penyediaan akses pembiayaan untuk menambah modal kerja. Tambahan modal digunakan untuk meningkatkan jumlah persediaan, menambah variasi barang, memenuhi kebutuhan pembelian dari pemasok, dan mengurangi kekosongan produk yang banyak dicari konsumen. Salah seorang pengguna pembiayaan menjelaskan bahwa keterbatasan modal sebelumnya membuat pembelian barang dilakukan dalam jumlah kecil: “Sebelum mendapat pembiayaan, saya belanja barang sedikit-sedikit karena modalnya terbatas. Barang

yang cepat habis kadang tidak langsung bisa saya isi lagi. Setelah ada tambahan modal, saya bisa mengambil barang lebih banyak.”

Informan lain menyatakan bahwa keputusan memilih BSI dipengaruhi oleh pertimbangan prinsip syariah dan kejelasan pembayaran: “Saya memilih BSI karena ingin pembiayaan yang sesuai syariah. Dari awal sudah dijelaskan jumlah pembiayaan dan angsuran yang harus dibayar, jadi saya bisa memperhitungkan dengan kemampuan warung.” Keterangan tersebut menunjukkan bahwa keputusan menggunakan pembiayaan tidak hanya dipengaruhi kebutuhan modal. Kejelasan kewajiban, persepsi terhadap prinsip syariah, reputasi bank, dan komunikasi dengan petugas turut membentuk kepercayaan pelaku usaha.

Dari perspektif petugas BSI, pembiayaan kepada pelaku usaha mikro memerlukan pemeriksaan terhadap kondisi usaha, kemampuan pembayaran, penggunaan dana, dan kestabilan arus kas. Salah seorang petugas menjelaskan: “Kami tidak hanya melihat besar atau kecil warungnya. Yang diperhatikan juga berapa lama usaha berjalan, bagaimana perputaran barang, kemampuan membayar, dan penggunaan dana yang diajukan. Kendalanya, sebagian pelaku belum memiliki catatan keuangan yang rapi.”

Ketiadaan laporan keuangan formal menyebabkan petugas bank perlu menggunakan informasi alternatif, seperti riwayat usaha, transaksi rekening, kondisi stok, dan hasil kunjungan lapangan. Dalam keadaan tersebut, kedekatan komunikasi antara petugas bank dan calon nasabah menjadi penting untuk memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai kondisi usaha. Informan pengguna pembiayaan juga menyampaikan bahwa tambahan modal belum otomatis menghasilkan peningkatan usaha. Dana harus dijaga agar tidak digunakan untuk kebutuhan rumah tangga: “Tambahan modal memang membantu, tetapi harus dijaga. Kalau uangnya tercampur untuk kebutuhan rumah, nanti barang tidak bisa diputar dan angsuran juga bisa terganggu.” Temuan ini memperlihatkan bahwa manfaat pembiayaan sangat dipengaruhi oleh kemampuan pelaku usaha mengendalikan penggunaan dana. Pembiayaan berfungsi sebagai sarana penguatan modal kerja, sedangkan keberhasilannya tetap bergantung pada disiplin pengelolaan, kecepatan perputaran barang, dan pemisahan keuangan usaha dari keuangan pribadi.

Pemanfaatan QRIS dan Mobile Banking dalam Transaksi Usaha

Selain pembiayaan, BSI mendukung digitalisasi warung melalui penyediaan QRIS, rekening, dan aplikasi mobile banking. Layanan tersebut memberikan alternatif transaksi bagi konsumen serta membantu pemilik warung melakukan pembayaran dan pemeriksaan dana tanpa harus datang langsung ke kantor bank. Informan yang menggunakan QRIS menilai bahwa layanan tersebut memberikan kemudahan ketika konsumen tidak membawa uang tunai: “Kadang pembeli sudah mengambil barang, tetapi ternyata tidak membawa uang tunai. Kalau ada QRIS, transaksi tetap bisa dilakukan. Saya juga tidak harus selalu menyediakan uang kembalian.”

Pemilik warung lain menjelaskan bahwa QRIS membantu mengurangi kekhawatiran terhadap uang palsu: “Kalau pembayaran melalui QRIS, saya lebih tenang karena uang langsung masuk ke rekening. Tidak perlu memeriksa uangnya asli atau tidak dan tidak ada masalah uang kembalian.” Meskipun demikian, penggunaan QRIS belum mendominasi transaksi. Sebagian besar konsumen masih menggunakan uang tunai. Intensitas penggunaan QRIS lebih tinggi pada konsumen usia muda dan pelanggan yang telah terbiasa menggunakan dompet digital atau mobile banking.

Selain menerima pembayaran, sebagian informan menggunakan mobile banking untuk transfer kepada pemasok, memeriksa saldo, membayar tagihan, dan mengelola transaksi tertentu. Seorang informan menjelaskan: “Sekarang kalau harus transfer kepada pemasok, saya tidak perlu pergi ke ATM. Dari warung bisa langsung melalui aplikasi. Saya juga bisa melihat apakah pembayaran QRIS sudah masuk.” Layanan tersebut menghemat waktu karena pemilik warung tidak perlu meninggalkan tempat usaha. Namun, penggunaan aplikasi juga menghadirkan kebutuhan baru dalam hal keamanan akun, pemahaman menu, dan kemampuan menyelesaikan masalah transaksi.

Petugas BSI menjelaskan bahwa sebagian pelaku usaha masih memerlukan pendampingan langsung: “Ada nasabah yang sekali dijelaskan langsung bisa menggunakan aplikasi, tetapi ada juga yang harus dibantu beberapa kali. Biasanya mereka masih takut salah menekan menu atau takut uangnya tidak masuk.” Temuan tersebut memperlihatkan bahwa penyediaan aplikasi dan QRIS tidak cukup untuk memastikan penggunaan secara berkelanjutan. Digitalisasi membutuhkan proses belajar yang mempertimbangkan kemampuan dan pengalaman setiap pemilik warung.

Peran BSI dalam Literasi dan Pengelolaan Keuangan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan pelaku warung dengan BSI tidak hanya berkaitan dengan pemberian modal dan transaksi. Kebutuhan memenuhi kewajiban pembiayaan serta penggunaan rekening mendorong sebagian informan mulai memperhatikan pengelolaan arus kas dan pemisahan keuangan.

Salah seorang informan mengakui bahwa sebelum menggunakan layanan perbankan, uang usaha dan uang keluarga tidak dibedakan: “Dulu semua uang dijadikan satu. Kalau ada kebutuhan rumah, langsung diambil dari laci warung. Akhirnya saya tidak tahu berapa sebenarnya keuntungan dan berapa modal yang masih ada.” Setelah menggunakan pembiayaan, informan tersebut mulai memisahkan dana usaha: “Sekarang saya berusaha memisahkan uang belanja barang, angsuran, dan kebutuhan rumah. Belum memakai laporan yang lengkap, tetapi paling tidak uang modal tidak langsung dipakai.”\

Informan lain menggunakan rekening sebagai sarana pemisahan dana: “Uang dari pembayaran digital saya biarkan masuk ke rekening. Uang itu biasanya dipakai untuk membayar pemasok atau angsuran. Jadi tidak semuanya dipegang secara tunai.” Namun, tingkat pencatatan masih berbeda-beda. Sebagian informan hanya mencatat utang pelanggan dan pembelian barang, sementara sebagian lainnya mulai mencatat penerimaan dan pengeluaran harian. Catatan transaksi digital membantu menunjukkan sebagian penerimaan, tetapi tidak mencakup seluruh transaksi tunai.

Pendamping UMKM menilai bahwa keterbatasan pencatatan menjadi persoalan mendasar pada usaha mikro: “Banyak pemilik warung merasa usahanya untung selama barang masih bisa dibeli kembali. Padahal mereka belum tentu mengetahui keuntungan bersih karena uang usaha bercampur dengan pengeluaran keluarga.” Pendamping lainnya menjelaskan bahwa literasi keuangan perlu diajarkan melalui cara yang sederhana: “Kalau langsung diminta membuat laporan yang rumit, pelaku usaha biasanya tidak melanjutkan. Pendampingan sebaiknya dimulai dari mencatat uang masuk, uang keluar, pembelian barang, dan memisahkan uang rumah tangga.” Temuan tersebut menunjukkan bahwa literasi keuangan tidak cukup dimaknai sebagai pengetahuan mengenai produk perbankan. Literasi juga mencakup kemampuan mengendalikan arus kas, memahami kewajiban pembiayaan, memisahkan modal dan keuntungan, serta menggunakan informasi transaksi dalam pengambilan keputusan.

Perubahan Kapasitas Usaha yang Dirasakan Informan

Beberapa informan pengguna pembiayaan menyampaikan adanya perubahan pada kapasitas usaha setelah memperoleh tambahan modal. Perubahan yang paling sering disampaikan berkaitan dengan meningkatnya jumlah dan variasi barang yang tersedia. Seorang pemilik warung menjelaskan: “Setelah modal bertambah, saya bisa menambah stok minuman, beras, minyak, dan beberapa barang yang sebelumnya jarang tersedia. Pembeli juga tidak terlalu sering pulang karena barang kosong.”

Informan lain menyatakan bahwa tambahan modal digunakan untuk memperbaiki sarana usaha: “Sebagian modal saya gunakan untuk menambah rak supaya barang lebih rapi. Kalau barang terlihat jelas, pembeli juga lebih mudah memilih.” Perubahan tersebut dipersepsikan membantu pelayanan dan kelancaran perputaran barang. Namun, tidak seluruh informan mengalami perubahan dengan tingkat yang sama. Informan yang belum memiliki pencatatan teratur kesulitan menjelaskan perubahan omzet secara pasti.

Salah seorang informan menyampaikan: “Saya merasa penjualan bertambah karena barang lebih lengkap, tetapi saya tidak punya catatan omzet sebelum dan sesudah. Jadi hanya bisa melihat dari barang yang lebih cepat habis.” Keterangan tersebut penting karena menunjukkan keterbatasan bukti mengenai peningkatan kinerja. Penelitian ini tidak menyimpulkan bahwa pembiayaan menyebabkan peningkatan omzet secara langsung. Temuan dibatasi pada perubahan kapasitas dan manfaat yang dirasakan oleh informan. Pemanfaatan pembayaran digital juga dipersepsikan memperluas pelayanan. Namun, dampaknya bergantung pada profil konsumen. Pada warung yang pelanggannya banyak menggunakan pembayaran digital, QRIS lebih sering digunakan. Pada warung dengan pelanggan yang mengutamakan uang tunai, manfaatnya masih terbatas sebagai pilihan tambahan.

Hambatan Akses Pembiayaan Formal

Tiga informan nonpengguna BSI memberikan pandangan yang berbeda mengenai pembiayaan formal. Mereka tidak selalu menolak keberadaan BSI atau prinsip syariah, tetapi mempertimbangkan prosedur, kelengkapan dokumen, kewajiban angsuran, dan fleksibilitas penggunaan dana. Salah seorang nonpengguna menjelaskan: “Kalau modal kurang, biasanya saya meminjam kepada keluarga. Prosesnya cepat dan tidak perlu banyak persyaratan. Kalau ke bank, saya khawatir harus menyiapkan dokumen yang belum saya punya.”

Informan lain merasa lebih aman menggunakan modal sendiri karena tidak ingin memiliki kewajiban tetap: “Saya lebih memilih mengembangkan warung pelan-pelan dari keuntungan. Kalau mengambil pembiayaan, setiap bulan harus ada angsuran, sedangkan penjualan kadang naik dan kadang turun.” Keterangan tersebut menunjukkan bahwa keputusan tidak menggunakan pembiayaan bukan semata-mata akibat kurangnya informasi. Pelaku usaha juga mempertimbangkan ketidakpastian pendapatan dan risiko memiliki kewajiban bulanan.

Keterbatasan pencatatan turut memengaruhi kesiapan mengajukan pembiayaan. Seorang informan menyatakan: “Saya belum punya pembukuan yang rapi. Kalau ditanya omzet atau keuntungan per bulan, saya tidak bisa menunjukkan angka yang pasti. Itu yang membuat saya belum berani mengajukan.” Dari sisi bank, pencatatan yang tidak lengkap menyulitkan penilaian kemampuan pembayaran. Namun, petugas menyatakan bahwa pelaku usaha tetap dapat memperoleh penjelasan dan pendampingan sebelum mengajukan pembiayaan: “Tidak semua nasabah mikro mempunyai laporan keuangan formal. Kami biasanya membantu menjelaskan data apa yang diperlukan dan melihat usaha secara langsung, tetapi calon nasabah tetap harus terbuka mengenai kondisi usaha dan kewajibannya.” Temuan ini menunjukkan bahwa hambatan pembiayaan muncul dari interaksi antara persyaratan lembaga dan kesiapan pelaku usaha. Penyederhanaan informasi, pendampingan administratif, dan komunikasi personal diperlukan untuk memperkecil jarak antara bank dan calon nasabah.

Hambatan Penggunaan Teknologi Digital

Hambatan digitalisasi ditemukan pada kemampuan menggunakan aplikasi, kualitas telepon seluler, stabilitas jaringan, dan kebiasaan konsumen. Beberapa informan masih bergantung pada anggota keluarga ketika menghadapi kesulitan teknologi. Salah seorang pemilik warung menjelaskan: “Kalau aplikasi bermasalah atau saya lupa cara melihat transaksi, biasanya saya meminta bantuan anak. Saya masih takut salah, apalagi kalau berhubungan dengan uang.” Keterbatasan jaringan juga mengganggu kelancaran pembayaran pada waktu tertentu: “Pernah pembeli sudah membayar, tetapi notifikasi belum masuk karena jaringan lambat. Kami harus menunggu dan mengecek lagi. Kalau pembeli terburu-buru, akhirnya lebih mudah memakai uang tunai.”

Selain kendala teknis, penggunaan QRIS dipengaruhi oleh kebiasaan pelanggan. Informan menyatakan bahwa sebagian pelanggan tetap menganggap pembayaran tunai lebih sederhana: “Walaupun QRIS tersedia, kebanyakan pembeli tetap membayar tunai karena belanjanya kecil. QRIS biasanya digunakan kalau pembeli tidak membawa uang atau nilai belanjanya agak banyak.” Petugas BSI juga mengakui bahwa proses edukasi tidak dapat dilakukan dengan pendekatan yang sama kepada seluruh nasabah: “Kemampuan digital setiap pelaku usaha berbeda. Ada yang cukup diberi petunjuk, tetapi ada yang harus didampingi sampai beberapa kali transaksi. Tantangannya adalah memastikan layanan itu benar-benar digunakan, bukan hanya didaftarkan.” Temuan ini menunjukkan bahwa transformasi digital berlangsung secara bertahap dan tidak sepenuhnya menggantikan transaksi tunai. Pendampingan perlu disesuaikan dengan kemampuan pengguna dan kondisi usaha.

Perbandingan Pengalaman Pengguna dan Nonpengguna BSI

Perbandingan pengalaman menunjukkan bahwa pengguna BSI melihat bank sebagai sumber pembiayaan yang lebih terstruktur sekaligus penyedia fasilitas transaksi digital. Mereka menilai pembiayaan membantu meningkatkan ketersediaan barang, sedangkan rekening dan QRIS memberikan alternatif pengelolaan transaksi. Salah seorang pengguna menjelaskan: “Dengan bank, saya mempunyai jadwal pembayaran yang jelas dan uang masuk melalui rekening bisa diperiksa. Memang ada kewajiban, tetapi saya menjadi lebih hati-hati mengatur uang.” Sebaliknya, nonpengguna lebih menekankan fleksibilitas dan kedekatan sumber dana informal: “Kalau meminjam kepada saudara, pembayarannya bisa dibicarakan sesuai keadaan. Hubungannya juga sudah saling percaya. Itu yang belum tentu saya rasakan ketika berhubungan dengan bank.”

Meskipun demikian, kelompok nonpengguna tidak sepenuhnya menolak layanan bank. Mereka membuka kemungkinan menggunakan pembiayaan apabila kebutuhan modal meningkat dan prosedur dapat dipahami: “Saya tidak menolak bank. Kalau nanti warung lebih besar dan membutuhkan modal banyak, mungkin saya akan mencoba. Tetapi saya perlu tahu proses dan hitungannya secara jelas.” Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa keputusan menggunakan BSI tidak dapat disederhanakan menjadi perbedaan antara pelaku usaha modern dan tradisional. Keputusan dipengaruhi kebutuhan modal, kondisi pendapatan, pengalaman terhadap bank, kemampuan administrasi, tingkat kepercayaan, dan preferensi dalam mengelola risiko.

Pembahasan

Pembiayaan Syariah sebagai Instrumen Penguatan Kapasitas Usaha

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa peran BSI terhadap warung kelontong Madura di Kabupaten Klaten terutama diwujudkan melalui penyediaan akses pembiayaan untuk kebutuhan modal kerja. Pelaku usaha menggunakan pembiayaan untuk menambah jumlah dan variasi barang, mengurangi kekosongan persediaan, serta menjaga kesinambungan pembelian dari pemasok. Temuan tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan pembiayaan warung kelontong tidak selalu diarahkan pada ekspansi usaha dalam skala besar,

melainkan pada pemeliharaan siklus operasional sehari-hari. Pada usaha ritel mikro, kelancaran perputaran barang menjadi penting karena keterbatasan persediaan dapat menyebabkan konsumen beralih ke warung atau toko lain.

Temuan ini sejalan dengan Ritonga dan Sinaga (2021), yang menunjukkan bahwa BSI menjalankan peran dalam mendukung pelaku UMKM melalui penyaluran pembiayaan dan pemberian keringanan sesuai kondisi nasabah. Nihayah dan Rifqi (2022) juga menempatkan perbankan syariah sebagai salah satu sumber permodalan yang dapat membantu UMKM mempertahankan kegiatan usahanya. Dalam konteks penelitian ini, pembiayaan BSI tidak hanya memberikan tambahan dana, tetapi juga membuka akses pelaku warung terhadap sistem keuangan formal yang lebih terstruktur.

Kesesuaian pembiayaan dengan kebutuhan modal kerja juga didukung oleh penelitian Aryanti, Nurhalizah, dan Jannah (2022), yang menemukan adanya keterkaitan antara pembiayaan mikro modal kerja BSI dan pengembangan UMKM di Kota Palembang. Sementara itu, Azis dan Azizah (2022) menjelaskan bahwa penyaluran KUR melalui BSI dapat membantu memenuhi kebutuhan permodalan UMKM, meskipun pelaksanaannya tetap mensyaratkan penilaian kelayakan dan kemampuan pembayaran calon nasabah. Temuan tersebut memperkuat argumentasi bahwa pembiayaan menjadi relevan ketika nominal, jangka waktu, dan pola pembayaran disesuaikan dengan karakter arus kas usaha mikro.

Meskipun demikian, hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa ketersediaan pembiayaan tidak secara otomatis meningkatkan kinerja usaha. Tambahan modal dapat kehilangan fungsi produktif apabila digunakan untuk konsumsi rumah tangga, pembayaran kewajiban lain, atau kebutuhan yang tidak berkaitan dengan perputaran usaha. Oleh karena itu, hubungan antara pembiayaan dan perkembangan usaha perlu dipahami sebagai proses yang dipengaruhi oleh kemampuan mengelola dana, kedisiplinan arus kas, perputaran persediaan, dan stabilitas penjualan. Penelitian ini tidak menyimpulkan bahwa pembiayaan secara langsung menyebabkan peningkatan omzet, tetapi menunjukkan bahwa pembiayaan dipersepsikan membantu pelaku usaha menjaga ketersediaan dan variasi barang dagangan.

Posisi BSI sebagai lembaga pembiayaan UMKM juga tidak dapat dilepaskan dari strategi kelembagaan yang lebih luas. Laporan tahunan BSI menunjukkan bahwa penguatan pembiayaan dan transformasi layanan digital menjadi bagian dari pengembangan bisnis bank. Pada tingkat industri, perkembangan keuangan syariah juga diarahkan untuk memperluas akses dan kualitas layanan kepada masyarakat serta sektor usaha produktif (PT Bank Syariah Indonesia Tbk, 2025; Otoritas Jasa Keuangan, 2025). Namun, keberhasilan strategi pada tingkat korporasi tetap ditentukan oleh pelaksanaan di tingkat kantor cabang, khususnya kemampuan petugas memahami karakter usaha mikro dan menjelaskan produk dalam bahasa yang mudah diterima calon nasabah.

Dengan demikian, kontribusi pembiayaan BSI dalam penelitian ini tidak hanya terletak pada penyaluran modal. Perannya juga mencakup proses menghubungkan usaha yang sebelumnya bergantung pada modal pribadi atau jaringan keluarga dengan mekanisme pembiayaan formal. Proses tersebut menuntut hubungan yang berbasis kepercayaan, penilaian yang proporsional terhadap kemampuan usaha, dan pendampingan agar dana benar-benar digunakan secara produktif.

Digitalisasi Transaksi dan Penerimaan Teknologi oleh Pelaku Warung

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan QRIS dan mobile banking telah memperluas pilihan transaksi pada warung kelontong Madura. QRIS memberikan alternatif bagi konsumen yang tidak membawa uang tunai, mengurangi kebutuhan menyediakan uang kembalian, dan menghasilkan catatan penerimaan melalui sistem perbankan. Sementara itu, mobile banking membantu pemilik warung memeriksa saldo, melakukan transfer, serta membayar pemasok atau tagihan tanpa meninggalkan tempat usaha.

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa digitalisasi pada usaha mikro tidak harus diawali dengan sistem manajemen yang kompleks. Penggunaan teknologi sederhana yang langsung berkaitan dengan transaksi harian dapat menjadi pintu masuk menuju perubahan pengelolaan usaha yang lebih luas. Arifqi dan Junaedi (2021) menjelaskan bahwa digitalisasi dapat membantu proses pemulihan dan pengembangan UMKM apabila diintegrasikan dengan kebutuhan nyata pelaku usaha. Aripin, Fatwa, dan Hannase (2022) juga menunjukkan bahwa layanan digital bank syariah berpotensi mendorong peningkatan literasi serta inklusi keuangan syariah.

Akan tetapi, penggunaan teknologi tidak hanya dipengaruhi oleh tersedianya fasilitas. Temuan penelitian menunjukkan bahwa QRIS lebih sering digunakan ketika konsumen telah terbiasa melakukan pembayaran digital. Pada lingkungan pelanggan yang masih mengutamakan uang tunai, QRIS hanya menjadi pilihan tambahan dan belum menggantikan transaksi konvensional. Kondisi tersebut sejalan dengan Sholihah dan Nurhapsari (2023), yang menemukan bahwa persepsi mengenai manfaat dan kemudahan penggunaan menjadi faktor penting dalam membentuk intensi pelaku UMKM menggunakan QRIS. Artinya, pemilik

warung cenderung menggunakan layanan secara konsisten apabila teknologi tersebut dipahami, mudah dioperasikan, dan memberikan manfaat yang dapat dirasakan langsung dalam kegiatan usaha.

Temuan penelitian juga memiliki kesesuaian dengan Puriati, Sugiartana, dan Mertaningrum (2023), yang menunjukkan bahwa penerapan QRIS memberikan manfaat bagi pelaku UMKM, tetapi tetap menghadapi kendala pada proses penggunaannya. Alifia, Permana, dan Harnovinsah (2024) selanjutnya menjelaskan bahwa QRIS memungkinkan UMKM menerima pembayaran dari berbagai penyedia layanan melalui satu standar kode, sehingga memperluas pilihan pembayaran konsumen. Dalam konteks warung kelontong Madura, manfaat tersebut terutama terlihat pada aspek kepraktisan, keamanan penerimaan, dan fleksibilitas pelayanan, bukan semata-mata pada peningkatan pendapatan.

Pembedaan ini penting karena penggunaan QRIS tidak dapat secara langsung dianggap meningkatkan omzet. Peningkatan pendapatan juga dipengaruhi lokasi usaha, kelengkapan barang, harga, intensitas pelanggan, jam operasional, dan persaingan. Oleh sebab itu, pembahasan penelitian ini menempatkan QRIS sebagai sarana yang memperbaiki proses transaksi dan berpotensi mendukung penjualan, bukan sebagai faktor tunggal yang menentukan peningkatan pendapatan.

Temuan tersebut relevan dengan arah kebijakan sistem pembayaran nasional. Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2030 menempatkan penguatan infrastruktur, inovasi, industri, dan inklusivitas sebagai bagian dari transformasi ekonomi keuangan digital (Bank Indonesia, 2024). Namun, pengalaman pelaku warung menunjukkan bahwa transformasi pada tingkat kebijakan tetap harus diterjemahkan menjadi layanan yang sederhana, stabil, aman, dan sesuai dengan kemampuan usaha mikro.

Literasi Keuangan dan Perubahan Pengelolaan Internal Warung

Selain memberikan akses pembiayaan dan layanan transaksi, hubungan dengan BSI mendorong sebagian informan mulai memperhatikan pemisahan uang usaha dan uang rumah tangga. Sebelum menggunakan layanan perbankan, sebagian pemilik warung mengelola seluruh penerimaan dalam satu tempat. Uang dari penjualan dapat langsung digunakan untuk keperluan keluarga tanpa pencatatan yang memadai. Kondisi ini menyulitkan pemilik mengetahui jumlah modal, keuntungan, dan kemampuan memenuhi kewajiban usaha.

Penggunaan rekening, catatan transaksi digital, dan kewajiban pembayaran pembiayaan mendorong informan untuk lebih berhati-hati mengatur arus kas. Meskipun sebagian besar belum membuat laporan keuangan lengkap, terdapat perubahan awal berupa pemisahan dana, pencatatan pembelian, dan penyisihan uang untuk pembayaran angsuran. Perubahan ini menunjukkan bahwa inklusi keuangan tidak cukup diukur melalui kepemilikan rekening atau penggunaan produk bank. Inklusi yang bermakna juga membutuhkan kemampuan menggunakan layanan tersebut untuk memperbaiki keputusan keuangan.

Temuan ini sejalan dengan Sa'diyah dan Eferyn (2024), yang menunjukkan bahwa pencatatan pada toko kelontong Madura umumnya masih terbatas pada penerimaan dan pengeluaran sederhana. Penelitian tersebut menekankan pentingnya digitalisasi laporan keuangan untuk membantu pemilik memisahkan kegiatan pribadi dari aktivitas usaha, menjaga konsistensi pencatatan, dan mendukung keberlanjutan bisnis.

Namun, digitalisasi pencatatan tidak dapat diterapkan melalui pemberian aplikasi semata. Pemilik warung membutuhkan model pencatatan yang sesuai dengan kapasitas dan rutinitas usahanya. Sistem yang terlalu rumit dapat ditinggalkan karena dianggap menambah beban pekerjaan. Tahap awal yang lebih realistis adalah mencatat uang masuk dan keluar, pembelian barang, kewajiban kepada pemasok, angsuran, serta pengambilan uang untuk kebutuhan rumah tangga.

Kebutuhan pendampingan tersebut semakin penting apabila dikaitkan dengan kesenjangan antara tingkat literasi dan penggunaan layanan keuangan syariah. Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2024 menunjukkan perlunya program edukasi yang lebih terarah agar masyarakat tidak hanya mengetahui keberadaan produk keuangan, tetapi mampu memilih dan menggunakannya sesuai kebutuhan (Otoritas Jasa Keuangan dan Badan Pusat Statistik, 2024). Dengan demikian, edukasi kepada pelaku warung seharusnya tidak terbatas pada penjelasan mengenai produk pembiayaan dan prosedur penggunaan aplikasi, tetapi juga mencakup kemampuan mengelola kas, mengukur kemampuan membayar, dan memahami risiko transaksi digital.

Modal Sosial, Kepercayaan, dan Pilihan terhadap Sumber Pembiayaan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak semua pemilik warung memilih menggunakan pembiayaan BSI. Tiga informan masih mengandalkan modal pribadi, keluarga, atau jaringan informal. Keputusan tersebut tidak selalu menunjukkan penolakan terhadap prinsip syariah. Pelaku usaha mempertimbangkan kemudahan memperoleh dana, fleksibilitas pembayaran, kedekatan hubungan, dan rendahnya beban administratif.

Temuan ini menunjukkan bahwa hubungan sosial merupakan bagian penting dalam keputusan ekonomi pelaku warung. Pembiayaan informal dianggap memiliki keunggulan karena dibangun melalui hubungan yang telah berlangsung lama dan dapat dinegosiasikan ketika kondisi usaha menurun. Sebaliknya, bank dipersepsikan memiliki prosedur, dokumen, dan jadwal pembayaran yang lebih tetap.

Wafiruddaroin dan Rezeky (2022) menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi pedagang kelontong Madura berkaitan dengan solidaritas sosial dan hubungan komunitas perantau. Jaringan sosial tidak hanya berfungsi sebagai ruang interaksi, tetapi dapat menyediakan informasi, bantuan tenaga, dukungan dalam membuka usaha, dan mekanisme mempertahankan keberlangsungan usaha. Temuan penelitian ini memperluas pandangan tersebut dengan menunjukkan bahwa jaringan sosial juga dapat menjadi sumber modal alternatif yang bersaing dengan pembiayaan perbankan formal.

Izzati, Addainuri, dan Fahrurrozi (2024) menjelaskan bahwa modal sosial warung Madura menciptakan peluang melalui kepercayaan dan hubungan antarpelaku, tetapi juga dapat menghadirkan tantangan dalam proses pengembangan usaha. Pada penelitian ini, modal sosial memiliki dua fungsi. Pertama, jaringan keluarga dan komunitas membantu pelaku usaha memperoleh modal secara cepat. Kedua, ketergantungan pada sumber informal dapat mengurangi kebutuhan berhubungan dengan bank, khususnya ketika manfaat pembiayaan formal belum dipahami secara jelas.

Pritanjaya dan Legawa (2025) juga menunjukkan bahwa warung Madura menjalankan strategi adaptasi dengan menegosiasikan identitas dan kebiasaan bisnisnya terhadap lingkungan lokal. Hal ini berarti hubungan sosial warung Madura tidak bersifat tertutup atau tidak berubah. Pelaku usaha dapat menerima praktik baru, termasuk layanan keuangan digital, selama inovasi tersebut dianggap sesuai dengan kebutuhan dan tidak mengganggu fleksibilitas operasional mereka.

Oleh karena itu, BSI tidak seharusnya memandang jaringan informal hanya sebagai penghambat inklusi keuangan. Jaringan tersebut justru dapat dijadikan pintu masuk melalui pendekatan komunitas, rekomendasi antarpedagang, edukasi kelompok, dan pendampingan oleh pihak yang telah dipercaya. Strategi ini lebih kontekstual dibandingkan promosi produk yang hanya menekankan margin, plafon, atau kemudahan administratif.

Penguatan Kapasitas, Daya Saing, dan Ketahanan Usaha

Informan pengguna pembiayaan menyampaikan adanya peningkatan ketersediaan dan variasi barang setelah memperoleh tambahan modal. Sebagian dana juga dimanfaatkan untuk memperbaiki penataan produk dan menambah rak. Perubahan tersebut dapat memperbaiki kemampuan warung dalam memenuhi kebutuhan konsumen, meskipun penelitian ini tidak memiliki data yang cukup untuk menyatakan adanya peningkatan omzet secara kausal.

Kelengkapan barang memiliki arti penting dalam persaingan usaha ritel. Heri dan Septiana (2024) menemukan bahwa harga yang kompetitif, kelengkapan barang, dan kualitas pelayanan menjadi unsur utama strategi penjualan warung Madura. Temuan tersebut mendukung hasil penelitian ini bahwa tambahan modal paling relevan ketika diarahkan untuk menjaga persediaan barang yang cepat terjual dan memperluas variasi kebutuhan konsumen.

Karakteristik jam operasional yang panjang juga menjadi salah satu sumber daya saing warung Madura. Farqi, Revizal, Aji, dan Maulida (2024) melihat keberadaan warung Madura 24 jam sebagai bagian dari aktivitas ekonomi lokal yang memberikan akses barang dan ruang interaksi kepada masyarakat. Namun, jam operasional yang panjang juga menuntut ketersediaan stok, tenaga kerja keluarga, keamanan, dan pengelolaan kas yang lebih disiplin.

Dalam konteks Kabupaten Klaten, keberadaan warung kelontong Madura perlu dipahami sebagai bagian dari aktivitas perdagangan dan pelayanan kebutuhan masyarakat di tingkat lokal. Publikasi Kabupaten Klaten dalam Angka memberikan konteks mengenai kondisi penduduk, tenaga kerja, dan perdagangan yang membentuk lingkungan ekonomi wilayah penelitian (Badan Pusat Statistik Kabupaten Klaten, 2025). Akan tetapi, data regional tersebut tidak dapat digunakan untuk menyimpulkan jumlah atau perkembangan warung Madura tanpa pendataan khusus.

Ketahanan usaha dalam penelitian ini tidak hanya berkaitan dengan besarnya modal, tetapi juga kemampuan menggabungkan sumber daya finansial, teknologi, pengetahuan, dan hubungan sosial. Warung yang memperoleh pembiayaan tetapi tidak memiliki pencatatan dan pengendalian dana dapat tetap menghadapi kesulitan. Sebaliknya, warung dengan modal terbatas dapat bertahan melalui perputaran barang yang cepat, dukungan keluarga, jam operasional panjang, dan kedekatan dengan konsumen. Hal ini memperlihatkan bahwa ketahanan usaha merupakan hasil interaksi beberapa kapasitas, bukan konsekuensi tunggal dari pembiayaan.

Hambatan Administratif dan Teknologis sebagai Persoalan Dua Arah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan dalam pemanfaatan layanan BSI tidak hanya berasal dari keterbatasan pelaku usaha. Persyaratan lembaga, model komunikasi, intensitas pendampingan, serta kesesuaian produk juga memengaruhi akses dan penggunaan layanan.

Dari sisi pelaku usaha, keterbatasan utama meliputi pencatatan keuangan yang belum teratur, kesulitan menjelaskan omzet, kekhawatiran terhadap kewajiban angsuran, dan kurangnya pemahaman mengenai prosedur pembiayaan. Dari sisi bank, ketiadaan data keuangan yang memadai meningkatkan kesulitan dalam menilai kelayakan serta kemampuan pembayaran. Situasi tersebut menciptakan lingkaran persoalan: bank membutuhkan informasi untuk menilai risiko, sedangkan pelaku usaha membutuhkan pendampingan agar mampu menyediakan informasi tersebut.

Hambatan serupa ditemukan dalam penggunaan teknologi. Kemampuan digital yang berbeda, ketergantungan pada anggota keluarga, keterbatasan perangkat, dan stabilitas jaringan memengaruhi konsistensi penggunaan QRIS dan mobile banking. Temuan Sholihah dan Nurhapsari (2023) mengenai pentingnya persepsi kemudahan memperlihatkan bahwa layanan yang secara teknis tersedia belum tentu diterima apabila pengguna merasa takut melakukan kesalahan atau tidak mampu mengatasi masalah transaksi. Penelitian Puriati, Sugiartana, dan Mertaningrum (2023) juga memperlihatkan bahwa manfaat QRIS berjalan berdampingan dengan kendala penerapannya.

Oleh karena itu, persoalan digitalisasi seharusnya tidak dipahami sebagai kekurangan individu semata. Desain layanan, bahasa petunjuk, respons bantuan, keamanan, kualitas jaringan, dan dukungan setelah aktivasi turut menentukan keberhasilan adopsi. Strategi nasional digitalisasi sistem pembayaran dan pengembangan industri keuangan syariah perlu diterjemahkan dalam bentuk pendampingan yang berkelanjutan pada tingkat pengguna (Bank Indonesia, 2024; Otoritas Jasa Keuangan, 2025).

Sintesis Temuan dan Kontribusi Penelitian

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa peran BSI terhadap warung kelontong Madura dibentuk oleh tiga dimensi yang saling berhubungan, yaitu akses finansial, kapasitas digital, dan hubungan sosial. Pembiayaan menyediakan sumber daya untuk menjaga dan menambah persediaan. Layanan digital membantu memperluas pilihan transaksi serta menghasilkan sebagian jejak keuangan. Sementara itu, kepercayaan, jaringan keluarga, dan komunikasi personal menentukan apakah pelaku usaha bersedia mengakses serta mempertahankan penggunaan layanan formal.

Temuan tersebut mengembangkan pembahasan mengenai perbankan syariah dan UMKM yang sebelumnya lebih banyak menekankan penyaluran pembiayaan. Pembiayaan penting, tetapi belum memadai apabila tidak disertai literasi, pencatatan, pendampingan, dan layanan digital yang dapat digunakan secara nyata. Di sisi lain, digitalisasi tidak dapat dipisahkan dari karakter sosial pelaku usaha. Teknologi akan lebih mudah diterima apabila diperkenalkan melalui hubungan yang dipercaya dan memberikan manfaat langsung bagi rutinitas usaha.

Kebaruan penelitian terletak pada penggabungan perspektif pembiayaan syariah, penerimaan teknologi, pengelolaan keuangan, dan modal sosial dalam satu konteks warung kelontong Madura di Kabupaten Klaten. Penelitian terdahulu mengenai pembiayaan BSI memperlihatkan pentingnya modal bagi UMKM, sedangkan penelitian QRIS menekankan manfaat dan kemudahan teknologi. Kajian warung Madura menunjukkan pentingnya solidaritas, kelengkapan barang, jam operasional, dan kemampuan beradaptasi. Penelitian ini memperlihatkan bahwa seluruh aspek tersebut berinteraksi dalam menentukan penerimaan serta manfaat layanan BSI.

Berdasarkan sintesis tersebut, optimalisasi dukungan BSI tidak cukup dilakukan dengan memperluas jumlah produk atau nasabah. Penguatan peran memerlukan pendekatan berjenjang yang dimulai dari pemetaan kebutuhan usaha, edukasi pencatatan sederhana, penilaian kemampuan pembayaran, fasilitasi pembiayaan yang proporsional, aktivasi layanan digital, dan pendampingan setelah layanan digunakan. Pendekatan ini membuat pembiayaan dan digitalisasi tidak berhenti sebagai produk perbankan, tetapi berfungsi sebagai bagian dari proses penguatan kapasitas usaha.

Implikasi Praktis

Temuan penelitian memberikan beberapa implikasi bagi BSI KCP Delanggu. Pertama, proses edukasi perlu dibedakan berdasarkan tingkat kesiapan pelaku usaha. Pelaku yang belum memiliki pembukuan dapat didampingi melalui pencatatan kas sederhana sebelum diarahkan pada sistem yang lebih kompleks. Kedua, sosialisasi pembiayaan harus menjelaskan manfaat, kewajiban, risiko, dan simulasi pembayaran secara terbuka agar pelaku usaha dapat menilai kesesuaian produk dengan kondisi arus kas.

Ketiga, pendampingan digital perlu dilakukan setelah QRIS atau mobile banking diaktifkan. Keberhasilan tidak seharusnya hanya diukur dari jumlah pengguna terdaftar, tetapi dari kemampuan nasabah menggunakan layanan secara aman, mandiri, dan konsisten. Keempat, pendekatan berbasis komunitas dapat digunakan untuk membangun kepercayaan. Pelaku warung yang telah memiliki pengalaman positif dapat dilibatkan dalam kegiatan edukasi tanpa mengabaikan kerahasiaan dan prinsip perlindungan nasabah.

Bagi pelaku warung, hasil penelitian menegaskan pentingnya pemisahan uang pribadi dan usaha, pencatatan transaksi, perhitungan kemampuan membayar, serta penggunaan pembiayaan untuk kebutuhan produktif. Pemanfaatan QRIS dan mobile banking juga perlu diikuti pengamanan kode akses, pemeriksaan transaksi, dan kewaspadaan terhadap penipuan.

Bagi pemerintah daerah dan pendamping UMKM, program literasi keuangan perlu menggabungkan kemampuan bisnis, pencatatan, pembiayaan, dan penggunaan teknologi. Kolaborasi antara BSI, pemerintah daerah, komunitas pedagang, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan dapat memperkecil kesenjangan antara tersedianya layanan dan kemampuan usaha mikro memanfaatkannya. Dengan pendekatan tersebut, inklusi keuangan syariah tidak hanya meningkatkan akses terhadap lembaga formal, tetapi juga memperkuat kualitas pengelolaan dan keberlanjutan usaha.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa BSI KCP Delanggu berperan dalam memperkuat warung kelontong Madura di Kabupaten Klaten melalui penyediaan pembiayaan syariah, fasilitasi transaksi digital, dan edukasi pengelolaan keuangan. Pembiayaan dimanfaatkan untuk menambah persediaan dan menjaga kelancaran usaha, sedangkan QRIS dan mobile banking membantu memperluas pilihan pembayaran, mempermudah transaksi, serta mendukung pencatatan penerimaan. Interaksi dengan BSI juga mendorong sebagian pelaku usaha mulai memisahkan keuangan pribadi dan usaha, meskipun praktik pembukuan masih sederhana. Pemanfaatan layanan BSI belum berlangsung secara merata. Hambatan utama meliputi keterbatasan pencatatan keuangan, persepsi terhadap kerumitan administrasi, kekhawatiran terhadap kewajiban angsuran, ketergantungan pada modal keluarga, rendahnya kemampuan digital, gangguan jaringan, dan masih dominannya transaksi tunai. Oleh karena itu, penguatan peran BSI memerlukan pembiayaan yang sesuai dengan arus kas usaha, edukasi keuangan sederhana, pendampingan digital berkelanjutan, serta pendekatan personal dan berbasis komunitas. Temuan penelitian terbatas pada warung kelontong Madura dalam wilayah layanan BSI KCP Delanggu dan sebagian besar didasarkan pada pengalaman informan. Penelitian selanjutnya perlu melibatkan wilayah yang lebih luas serta menggunakan data keuangan sebelum dan sesudah pembiayaan untuk menilai perubahan usaha secara lebih terukur.

DAFTAR REFERENSI

- Alifia, N., Permana, E., & Harnovinsah, H. (2024). Analisis penggunaan QRIS terhadap peningkatan pendapatan UMKM. *Jurnal Riset Pendidikan Ekonomi*, 9(1), 102–115. <https://doi.org/10.21067/jrpe.v9i1.9940>
- Arifqi, M. M., & Junaedi, D. (2021). Pemulihan perekonomian Indonesia melalui digitalisasi UMKM berbasis syariah di masa pandemi COVID-19. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 3(2), 192–205. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v3i2.311>
- Aripin, N. T., Fatwa, N., & Hannase, M. (2022). Layanan digital bank syariah sebagai faktor pendorong indeks literasi dan inklusi keuangan syariah. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 5(1), 29–45. [https://doi.org/10.25299/syarikat.2022.vol5\(1\).9362](https://doi.org/10.25299/syarikat.2022.vol5(1).9362)
- Aryanti, F. P., Nurhalizah, F., & Jannah, H. (2022). Pengaruh kontribusi pembiayaan mikro modal kerja di dalam lembaga keuangan perbankan syariah terhadap pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah di Kota Palembang: Studi kasus Bank Syariah Indonesia KC Demang. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 6(2), 699–709. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v6i2.566>
- Azis, M., & Azizah, L. M. (2022). Peran penyaluran pembiayaan Kredit Usaha Rakyat di Bank Syariah Indonesia terhadap perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah di Kabupaten Mojokerto. *WADIAH*, 6(2), 160–190. <https://doi.org/10.30762/wadiah.v6i2.165>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Klaten. (2025). Kabupaten Klaten dalam angka 2025. <https://klatenkab.bps.go.id/id/publication/2025/02/28/1def13ebff3f50855163b736/kabupaten-klaten-dalam-angka-2025.html>
- Bank Indonesia. (2024). *Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2030: Mengakselerasi ekonomi digital nasional untuk generasi mendatang*. <https://www.bi.go.id/id/publikasi/kajian/Pages/Blueprint-Sistem-Pembayaran-Indonesia-2030.aspx>

- Farqi, A. F., Revizal, Y. N. S., Aji, W., & Maulida, T. P. (2024). Analisis fenomena warung Madura 24 jam dalam perspektif solidaritas dan pembangunan ekonomi modern di Desa Tegalboto, Summersari, Jember. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 2(3), 29–40. <https://doi.org/10.61132/jepi.v2i3.640>
- Heri, I. A., & Septiana, A. (2024). Strategi penjualan pada warung Madura: Studi kasus pada warung Madura di Kabupaten Bangkalan. *Kabilah: Journal of Social Community*, 9(1), 182–190.
- Izzati, I. N., Addainuri, M. I., & Fahrurrozi, F. (2024). Aspek modal sosial: Peluang dan tantangan warung Madura di Kota Tangerang Selatan. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 8(3), 1034–1048. <https://doi.org/10.31955/mea.v8i3.4554>
- Nihayah, A. Z., & Rifqi, L. H. (2022). Kontribusi perbankan syariah terhadap permodalan UMKM selama pandemi COVID-19. *Jurnal Ecodemica: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis*, 6(2), 183–194. <https://doi.org/10.31294/eco.v6i2.12998>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2025). Laporan perkembangan keuangan syariah Indonesia 2024. <https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/laporan-perkembangan-keuangan-syariah-indonesia/Pages/Laporan-Perkembangan-Kuangan-Syariah-Indonesia-2024.aspx>
- Otoritas Jasa Keuangan, & Badan Pusat Statistik. (2024). Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2024. <https://ojk.go.id/id/Fungsi-Utama/Perilaku-Pelaku-Usaha-Jasa-Kuangan/SNLIK/Pages/Survei-Nasional-Literasi-dan-Inklusi-Kuangan-2024.aspx>
- Pritanjaya, I. N. S., & Legawa, I. G. A. (2025). Negosiasi identitas dan glokalisasi ekonomi: Strategi adaptasi warung Madura di tengah hegemoni ritel modern dan budaya lokal Bali. *SABANA: Jurnal Sosiologi, Antropologi, dan Budaya Nusantara*, 4(3), 538–547. <https://doi.org/10.55123/sabana.v4i3.7102>
- PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (2025). Laporan tahunan 2024. <https://ir.bankbsi.co.id/misc/AR/AR2024-ID/index.html>
- Puriati, N. M., Sugiartana, I. W., & Mertaningrum, N. P. E. (2023). Efektivitas penerapan sistem pembayaran Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS) pada UMKM di Kabupaten Karangasem. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, 13(3), 332–338. <https://doi.org/10.23887/jiah.v13i3.70942>
- Ritonga, N., & Sinaga, R. V. I. (2021). Peran perbankan syariah terhadap UMKM selama pandemi COVID-19: Studi kasus Bank Syariah Indonesia KC Medan. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 6(2), 240–253. <https://doi.org/10.30829/ajei.v6i2.10007>
- Sa'diyah, H., & Eferyn, K. (2024). Analisis penerapan digitalisasi laporan keuangan dalam meningkatkan omset UMKM toko kelontong Madura. *Journal of Economic, Business and Accounting (COSTING)*, 7(5), 709–716.
- Sholihah, E., & Nurhapsari, R. (2023). Percepatan implementasi digital payment pada UMKM: Intensi pengguna QRIS berdasarkan Technology Acceptance Model. *Nominal: Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen*, 12(1), 1–12. <https://doi.org/10.21831/nominal.v12i1.52480>
- Wafiruddaroin, M., & Rezeki, S. M. (2022). Dinamika sosial budaya komunitas pedagang kelontong Madura di Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan. *Muqoddima: Jurnal Pemikiran dan Riset Sosiologi*, 3(2), 119–130. <https://doi.org/10.47776/MJPRS.003.02.05>